

EVALUASI PERAN PENDIKAN ISLAM PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Iman Subasman

Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
E-mail : imansubasman@gmail.com

Faat Nasyiruddin

STAI Sayid Sabiq Indramayu
E-mail: faatnasyiruddin@paisayidsabiq.ac.id

Received	Revised	Accepted
2 February 2020	2 March 2020	22 March 2020

EVALUATION OF ISLAMIC EDUCATION ROLE IN THE ERA OF INDUSTRY REVOLUTION 4.0

Abstract

Technological developments in the industrial revolution era 4.0 have influenced the character of students. To maintain the negative impact of technological development, the role of Islamic education is needed. Using qualitative research methods, literature studies get several findings that to enhance the role of education in anticipating changes in the character of students, Islamic education; requires policy support, adequate support of resources, support from the community, socialization to policy implementers and absorbing pesantren values.

Keywords: Islamic education evaluation, industry revolution era 4.0, and character education.

Abstrak

Perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi karakter pelajar. Untuk menjaga dampak negative dari perkembangan teknologi diperlukan peran pendidikan islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka mendapatkan beberapa temuan bahwa untuk meningkatkan peran pendidikan dalam mengantisipasi perubahan karakter para pelajar maka pendidikan islam ; membutuhkan dukungan kebijakan, dukungan sumber daya yang memadai, dukungan dari masyarakat, sosialiasi kepada para implementator kebijakan dan menyerap nilai-nilai pesantren.

Kata kunci : evaluasi pendidikan islam, era revolusi industry 4.0, dan pendidikan karakter

Pendahuluan

Isi negatif dari revolusi industri 4.0 perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Banyak data menyatakan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang menimbulkan pergeseran karakter kalangan remaja, misalnya gejala kekerasan yang dipicu oleh media melalui *gadget*¹. Realitas ini menjadi hal yang memprihatinkan. Jika para pelajar tidak memanfaatkan perkembangan teknologi menjadi hal positif dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak pihak akan terlibat dalam perbaikan karakter ini dan salah satu peran yang perlu ditingkatkan adalah peran sekolah. Peran sekolah perlu mendapatkan perhatian, untuk tetap berpegang kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan di Indonesia. Menjaga agar para pelajar tidak terpengaruh dengan budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang hadir melalui dunia maya.

Antisipasi dari para pihak terhadap permasalahan ini perlu menjadi bahan kajian. Dengan memperhatikan ketercapaian program peningkatan karakter siswa sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan pendidikan karakter di sekolah sebagai salah satu cara untuk menjaga pelajar yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pada beberapa aspek, pendidikan karakter telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui kegiatan, buku karakter, juga berbagai metode pembelajaran yang mengedepankan sistem pendidikan karakter di sekolah. Diluar rumah atau pasca sekolah para pelajar pun telah dikondisikan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat seperti ekstrakurikuler dalam bidang seni, olah raga dan peningkatan kemampuan akademik. Namun, para pihak masih memandang cara ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Peran pemerintah masih dinilai kurang berpihak pada peningkatan karakter siswa dan cara yang dilakukan di beberapa daerah menjadi kontroversi dengan keinginan masyarakat². Memperhatikan keadaan inilah sudah seharusnya program peningkatan karakter terus mendapatkan kajian yang lebih serius. Dalam konteks ini maka evaluasi terhadap program penanaman nilai-nilai karakter perlu dilakukan secara kontinu.

Peranan pendidikan karakter diperlukan melalui pendekatan agama. Pendekatan agama merupakan pendekatan yang tepat untuk menanamkan karakter³. Diperlukan adanya rumusan yang cukup baik agar penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan keagamaan tersebut menjadi diminati oleh para pelajar. Saat ini pendidikan karakter dengan pendekatan keagamaan masih dianggap tidak menarik kepada para pelajar. Untuk keperluan tersebut maka modifikasi dan kreatifitas penanaman karakter perlu ditingkatkan dan terus-menerus ditingkatkan. Pada aspek kreatifitas, pendidikan karakter berbasis agama perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar selaras dengan kebijakan. Kegiatan tersebut pun harus mendapatkan legalitas yang baik menurut pandangan publik dan pemerintah. Adanya isu radikalisme, intoleransi dan anti NKRI (Negara Kesatuan Republik

¹ Febrino Febrino, "Tindakan Preventif Pengaruh Negatif Gadget Terhadap Anak," *NOURA: JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK* 1, no. 1 (2017): 1–21.

² Arief Aji Nugroho, "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PROGRAM BELA NEGARA DI MEDIA ONLINE METROTVNEWS.COM DAN SINDONEWS.COM PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER 2015," 2017.

³ Darosy Endah Hyoscyamina and Kartika Sari Dewi, "Pengembangan Program Parenting Bagi Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Psikologi Positif Dan Karakter Islami," 2012.

Indonesia) sempat menjadikan kegiatan banyak dihindari oleh siswa atas arahan orang tua yang tidak memahami konteksnya. Tapi ini menjadi sebuah alasan agar terjadi perbaikan dari banyak aspek di sekolah. Peranan keislaman dalam kegiatan pendidikan karakter tidak boleh menurut hanya karena isu-isu anti NKRI, intoleransi atau radikalisme.

Penelitian PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2018 menyatakan Indonesia berada pada posisi 72 dari 78 negara⁴. Kondisi ini, menjadi keprihatinan bangsa terhadap tingkat capaian pendidikan di Indonesia yang jauh dibawah prestasinya dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. PISA memberikan gambaran keadaan Indonesia pada aspek matematika, sains dan bahasa. Tentu keprihatinan ini, tidak cukup menjadi keluhan para pemangku kepentingan, indikasi adanya ketertinggalan dengan negara-negara lain menjadi perspektif bahwa masa depan bangsa juga menjadi tertinggal. Sekolah menjadi sasaran untuk melakukan evaluasi dan pemerintah menjadi sasaran bagaimana kebijakan yang diberikan kepada sekolah harus meningkatkan kualitas pendidikan.

Generasi bangsa ke depan harus mempunyai kualitas yang tinggi, agar mampu bersaing dengan negara-negara asing. Upaya peningkatan kualitas pada bidang sains, matematika dan bahasa pun akhir perlu mendapatkan perhatian. Salah satu aspek yang dapat diandalkan untuk meningkatkan penguasaan tiga kompetensi tersebut adalah melalui peningkatan motivasi dan spiritual. Upaya untuk meningkatkan tersebut di antaranya adalah melalui pendekatan agama. Peran pendidikan agama menjadi salah satu cara untuk menyadarkan siswa dalam meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya meningkatkan kompetensi melalui pendekatan agama ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan posisi PISA Indonesia.

Diantara peran yang dibutuhkan adalah melakukan evaluasi terhadap peran pendidikan Islam di sekolah pada masa Era 4.0 ini. Beberapa ciri yang dikemukakan oleh para ahli tentang keadaan revolusi industri 4.0 ini adalah menyempitnya lapangan pekerjaan karena sebagian lapangan pekerjaan telah tergantikan oleh tenaga mesin otomatis⁵. Selain itu menyempitnya lapangan pekerjaan pada Era 4.0 adalah mulai tergantikannya ingat manusia dengan IoT (*internet of think*) dan keadaan tersebut telah memasyarakat dengan istilah dunia dalam genggaman. Istilah tersebut tersebut digunakan untuk menggambarkan bahwa dunia internet dan *gadget* sangat berkembang cepat⁶. Selanjutnya dampak dari berkembangnya internet adalah meningkatnya aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan manusia untuk bisa mengetahui dan mengendalikan apapun dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi. Dunia tanpa geografis telah memasuki sekolah, sehingga para pelajar perlu karakter yang kuat untuk mengendalikan keadaan tersebut. Dengan keadaan tersebut maka dapat diprediksi pentingnya kegiatan

⁴ The Programme, International Student Assessment, and I Tables, "Greece What 15-Year-Old Students in Greece Know and Can Do Figure 1 . Snapshot of Performance in Reading , Mathematics and Science," 2018, 1–10, http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SAU.pdf.

⁵ Dian Cita Sari, Deddy Wahyudin Purba, and Muhammad Said Hasibuan, "Inovasi Pendidikan Lewat Transpormasi Digital" (Yayasan Kita Menulis, 2019).

⁶ Sari, Purba, and Hasibuan.

keagamaan yang dapat memasuki berbagai aspek khususnya bidang pendidikan. Upaya pendidikan Islam sebagai sarana untuk menjadi pembentukan karakter kuat dalam pengendalian perkembangan keadaan era 4.0 menjadi sangat urgen tuntut diteliti.

Maka kajian dan evaluasi terhadap peran pendidikan Islam perlu dilakukan baik melalui kajian pustaka atau penelitian lapangan sebagai upaya untuk menjaga agar pendidikan Islam tetap mencapai saran yang baik dan menjadi cara untuk memperbaiki keadaan efek era 4.0. Kajian evaluasi yang telah dilakukan penelitian sebagai jawaban terhadap beberapa rumusan masalah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, dukungan sumber daya pada kegiatan-kegiatan keislaman, bagaimana sosialisasi dilakukan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat, bagaimana penanaman nilai-nilai pesantren untuk meningkatkan pendidikan karakter, penanaman Islam moderat dan perbaikan kualitas guru agama di sekolah.

Metode Penelitian

Metode menggunakan metode studi literatur. Bahan yang menjadi kajian, oleh peneliti dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang relevan dengan tema pokok bahasan. Pada beberapa data peneliti mengambil data yang dilanjutkan dengan mengoleksi data. Selanjut coding dan triangulasi antar data penelitian dilakukan untuk melihat hubungan keterkaitan antar data atau klasifikasi data. Selanjutnya penulis menyusunnya menjadi sebuah konsep dan gagasan untuk menyampaikan masukan dan kontribusi ilmu pengetahuan dan perbaikan peran pendidikan Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Islam Membutuhkan Kebijakan

Peran penting pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan⁷. Dalam bidang pendidikan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar pendidikan seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan mempunyai dampak yang baik terhadap pembangunan sumberdaya manusia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dilakukan dengan menerbitkan kebijakan mengenai peningkatan kompetensi guru⁸. Peningkatan kompetensi guru dilakukan dengan pelatihan, sertifikasi dengan harapan melalui kegiatan-kegiatan tersebut guru dapat meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan, keterampilan mengajar, kepedulian terhadap siswa dan sosial keamasarakannya. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi bahwa upaya pemerintah banyak menjadikan guru bersemangat untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan kompetensinya. Kebijakan lainya adalah dengan memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru, setelah melalui beberapa penyaringan administrasi dan keterampilan serta ujian kompetensi. Tampak

⁷ Asih Widi Lestari and Firman Firdausi, "Peran Pemerintah Kota Batu Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 30, no. 3 (2017): 260–65.

⁸ Bachtiar Dwi Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Studi Pemerintahan* 2, no. 2 (2011).

bahwa, program sertifikasi dan pelatihan yang mendapat dukungan penuh dengan kebijakan menjadi program yang mendapatkan respon yang baik. Kebijakan juga berdampak kepada sekolah dan kepada kinerja guru.

Memperhatikan keadaan tersebut tampaknya diperlukan adanya gagasan sertifikasi khusus untuk guru agama. Upaya tersebut dilakukan untuk menjadikan guru agama sebagai guru yang menjadi daya tarik dikalangan guru. Adanya guru sertifikasi agama yang mendapat prioritas kebijakan sertifikasi, diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas guru agama. Peran guru agama melalui program yang didukung kebijakan akan menjadi cara untuk meningkatkan pembelajaran agama di kelas dan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan karakter di sekolah

Kebijakan yang diberikan untuk menjangkau pendidikan agama dan guru agama sebaiknya menjadi kebijakan pemerintah pusat⁹. Saat ini alasan yang sering muncul tentang kebijakan bidang keagamaan di daerah, dengan alasan sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat. Dengan alasan itu, pemerintah daerah tidak memberikan bantuan berupa kebijakan anggaran untuk bidang pendidikan keagamaan karena hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Melihat kondisi seperti ini, perlu dibangun kesepahaman pemerintah pusat dan daerah. Setidaknya tidak ada larangan untuk pemerintah daerah memberikan perhatian untuk pendidikan bidang keagamaan. Hal yang ingin didorong adalah keberpihakan kebijakan pemerintah daerah kepada pendidikan keagamaan. Adanya perhatian pemerintah daerah untuk memberikan prioritas terhadap kegiatan keagamaan menjadi cara untuk lebih menarik perhatian bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang sangat penting menghadapi era 4.0. Tetapi jika yang terjadi pendidikan keagamaan ini seakan menjadi bidang yang tidak diprioritaskan maka kegiatan keagamaan pun tidak menjadi kegiatan yang banyak diminati di kalangan guru maupun siswa.

Aspek penting lainnya dari kebijakan adalah dukungan kebijakan anggaran. Sebaiknya ada keseragaman cara pandang antara pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dengan DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) pada aspek dukungan kebijakan anggaran. Kerjasama dalam membangun kesepahaman tema keagamaan menjadi sangat penting untuk peningkatan dukungan anggaran pada pendidikan keagamaan di daerah. Upaya menghilangkan sekat ego sektoral eksekutif dan legislatif tidak mudah untuk dilakukan kecuali ada aturan dari pemerintah pusat untuk membangun kesepahaman¹⁰. Sangat diperlukan regulasi pusat yang dapat diturunkan kepada daerah agar terjadi kesalahpahaman tentang pendidikan keagamaan di daerah. Adanya komunikasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah akan memberikan daya dukung yang kuat terhadap pendidikan keagamaan untuk peningkatan karakter pelajar menghadapi keadaan revolusi 4.0. Inti persoalan yang segera harus diselesaikan adalah bagaimana koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah dapat terjadi agar pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kesepakatan untuk mengatur daya dukung anggaran dalam pendidikan keagamaan.

⁹ Abd Rouf, "Potret Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 1 (2015): 187–206.

¹⁰ Haidir Fitra Siagian, *Komunikasi Politik Ulama* (Alauddin University Press, 2012).

Saat ini daya dukung anggaran terhadap bidang keagamaan masih bervariasi. Sebagian besar perbedaan itu tergantung kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala daerah dan dukungan politik daerah.

Pada daerah yang kepala daerahnya mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan dan mendapat dukungan politik maka kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana, namun pada daerah yang tidak mendapatkan dukungan politik maka tidak akan terjadi dukungan anggaran sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan anggaran menjadi paket kesepakatan eksekutif dan legislatif, produknya adalah kebijakan politik¹¹. Maka di beberapa daerah tetap saja kebijakan yang berjalan adalah kebijakan dengan dukungan politik dan selalu dinilai politis. Maka solusi pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan perhatian yang tinggi terhadap pembangunan pendidikan keagamaan akan menjadi salah satu solusi untuk peningkatan karakter pelajar di daerah.

Ada beberapa contoh daerah yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan keagamaan di daerah, misalnya di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat dan di Kabupaten Jember Jawa Timur. Kedua daerah tersebut atas inisiatif dan kesepakatan dari pemerintah daerah dan legislatif menggagas dan menggulirkan program keagamaan. Di Kabupaten Pangandaran pemerintah daerah menggagas dan melaksanakan program keagamaan ajengan masuk sekolah¹². Para program tersebut ajengan atau kiai diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan pendidikannya kepada pelajar di sekolah. Kegiatan tersebut tidak semata memberikan pelajaran dan pemberian pengetahuan yang disampaikan kepada anak-anak di kelas, namun lebih mendasar lagi dari itu adalah memberikan keteladanan dan kekuatan spritual ajengan dipandang mampu memberikan perubahan positif terhadap perilaku siswa. Memenadak nkegiatan yang akan telah memasuki tahun ketiga berdasarkan evaluasi terus meningkat perbaikan dan capaian program. Upaya ini tampak bahwa melalui dukungan kebijakan dan kebijakan anggaran dapat membrikan sebuah terobosan baru di daerah sesuai kebutuhannya. Hal yang menjadi catatan penting lainnya adalah, program tersebut dapat saja dinilai tidak sinkron dengan kebijakan kurikulum pemerintah pusat, untuk itu koordinasi dan adanya kebijakan pusat untuk pendidikan daerah akan sangat bermanfaat dan berguna untuk pelayanan pendidikan keagamaan.

Sementara untuk di Kabupaten Jember Jawa Timur program keagamaan dilakukan dengan memberikan perhatian yang prima kepada pelajar penghapal Al Quran¹³. Melalui kebijakan dari pemerintahan daerah, para penghapal Al Quran mendapat beberapa fasilitas misalnya beasiswa, dibebaskan memilih melanjutkan sekolah negeri dan mendapatkan fasilitas kesehatan serta melanjutkan ke perguruan

¹¹ Ali Miftakhu Rosyad, "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Muhammadiyah Se-Kabupaten Indramayu. Al-Afkar," *Journal for Islamic Studies* 4 (n.d.).

¹² LALA JULAWATI, "PELAKSANAAN PROGRAM AJENGAN MASUK SEKOLAH OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2019): 89–102.

¹³ Siti Nursyamsiyah, "Penguatan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Mu'adalah Di Era Globalisasi (Studi Kasus Pondok Pesantren Modern Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember)," *TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 2, no. 1 (2019): 21–34.

tinggi atas biaya pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Pengandaran dan Jember memberikan cerminan bahwa kebijakan terhadap pendidikan keagamaan telah mendapatkan dukungan politik dan memberikan dampak yang positif. Setidaknya keadaan ini menjadi inspirasi kepada daerah lainnya untuk meningkatkan pendidikan keagamaan dengan dukungan kebijakan. Pendidikan keislaman sebaiknya tetap menjadi perhatian pemerintah pusat. Memprioritaskan kebijakan dapat saja berupa kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk diperbolehkan memberikan dukungan kebijakan dan kebijakan anggaran kepada pendidikan keagamaan¹⁴. Menarik urusan agama menjadi urusan kewenangan pusat masih memberikan perbedaan tafsir di daerah, sebagian memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan untuk mengurus semua hal tentang keagamaan sampai akhirnya yang dipahami adalah pemerintah daerah tidak berani untuk memberikan bantuan pendidikan keagamaan di daerah.

Memberikan kebijakan pendidikan keagamaan juga hendaknya menghilangkan dikotomi terhadap pendidikan agama dan umum. Adanya komunikasi yang baik dinas pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian agama di daerah akan memberikan dukungan yang sangat positif terhadap perkembangan pendidikan keagamaan. Adanya kerjasama dalam bidang peningkatan mutu keagamaan menjadi hal yang dapat menunjang karakter siswa di sekolah. Menjadikan pendidikan keagamaan dan pendidikan lainnya dalam dua kutub berbeda tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan krisis perilaku pelajar. Maka menghilangkan dikotomi juga akan memberikan dampak sangat baik terhadap implementasi kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan yang dapat merekatkan koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD atau dinas pendidikan kebudayaan dengan kementerian agama di daerah akan memudahkan capaian pendidikan keagamaan untuk peningkatan karakter siswa. Harapannya kebijakan untuk peningkatan pendidikan karakter tersebut terus dilakukan evaluasi untuk memberikan masukan terhadap program program peningkatan pendidikan karakter di sekolah. Dari uraian diatas maka peran pendidikan islam sangat dibutuhkan dan untuk mengimplementasikannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pendidikan Keislaman Butuh Dukungan Sumber Daya

Pendidikan islam membutuhkan dukungan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya berupa bentuk materi. Sumber daya manusia adalah sumber utama untuk memberikan dan menjadikan kebijakan¹⁵. Tanpa adanya SDM yang memadai kebijakan yang dirancang dan disetujui tidak akan memberikan dampak yang berarti. Memadainya sumber daya

¹⁴ Juhji JUHJI and Prasart NUANGCHALERM, "Interaction between Science Process Skills and Scientific Attitudes of Students towards Technological Pedagogical Content Knowledge," *Journal for the Education of Gifted Young Scientists* 8, no. 1 (n.d.): 1–16.

¹⁵ Ali Miftakhu Rosyad, "Al-Afkar, Journal for Islamic Studies URGENSI INOVASI PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Al-Afkar, Journal for Islamic Studies THE URGENCY OF LEARNING INNOVATION ON ISLAMIC RELIGIOUS STUDY" 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.5281/zenodo.2546882>.

manusia mempunyai dua dimensi yaitu kompetensi dan perilaku. Kompetensi dibutuhkan dalam menjadikan kebijakan dengan memahami secara detail rincian bagaimana kebijakan itu dilaksanakan sesuai kondisi dan disiplin penegakan kebijakan sedang perilaku dimaksudkan agar para implementator kebijakan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdampak kepada menurunnya atau tidak berjalannya kebijakan.

Kebutuhan kompetensi yang baik dalam implementasi kebijakan¹⁶ juga harus diimbangi dengan perilaku yang baik dari para implementatornya¹⁷. Seringkali kebijakan di lapangan perilaku itu menutupi kompetensinya, masih adanya sikap uka dan tidak suka dalam menjalankan kebijakan. Hal tersebut merupakan ciri yang paling mudah dikenali pada saat melakukan evaluasi. Di beberapa daerah sarjana pendidikan islam dari perguruan tinggi agama islam mendapatkan perlakuan yang kurang berimbang. Saat penerimaan pegawai misalnya lulusan sarjana tersebut dinyatakan tidak dapat mengikuti ters dengan alasan di perguruan tingginya dibawah departemen keagamaan. Hal ini merupakan refleksi bahwa implementasi kebijakan untuk penerimaan pegawai tidak dapat diimplementasikan karena perilaku pada implementatornya. Sementara di daerah yang lain dengan kasus yang sama tetapi kebijakan pemerintah daerahnya membolehkan untuk diterima sebagai calon pegawai. Satu kasus yang sama namun disikapi dengan sikap yang berbeda menunjukkan cara pandang, pemahaman dan sikap pegawai yang mengimplementasikan kebijakan, mempunyai perilaku yang berbeda.

Dimensi lainnya tentang dukungan sumberdaya adalah kesiapan untuk memahami mempelajari kebijakan. Kebijakan pemerintah sudah melewati berbagai proses sampai kepada proses menjadikannya sebagai lembaran negara. Diharapkan para implementator dapat memahami kebijakan tersebut untuk dilaksanakan. Kesiapan dalam menjalankan kebijakan ini merupakan hal yang penting untuk pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Pemerintah terus melakukan evaluasi diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan instrumen yang memadai agar pendidikan islam yang dilaksanakan di setiap daerah dan mendapatkan perhatian baik. Kesiapan memahami dapat juga dinilai dari kesiapan untuk melakukan sosialisasi kepada publik dan *stake holder* lainnya agar kebijakan tersebut dapat dipahami dengan baik. Dalam penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah) misalnya, kebijakan tersebut kurang tersosialisasi sempurna kepada masyarakat dan orang tua siswa. Maka di beberapa daerah dana BOS menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Permasalahan pada BOS kembali pada persoalan awal yaitu perilaku, maka BOS bukan masalah ketersediaan dana untuk guru dan sekolah tetapi masalah perilaku pegawai yang melaksanakannya. Untuk itu kepada para pegawai diperlukan adanya pembinaan terhadap perilakunya. Nilai-nilai keagamaan diperlukan bukan hanya untuk pelajar namun dilakukan juga kepada para guru dan pengelola sekolah.

¹⁶ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 1–11.

¹⁷ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1–12.

Maka kebijakan membutuhkan lagi satu dimensi yaitu perilaku yang baik dari para pelaksana¹⁸. Pembinaan dan peningkatan karakter kepada aparatur, guru dan pegawai menjadi urgen semata tidak hanya menjadi ketealadanan pada lingkungan sekolah tetap juga menjadi bagian untuk meningkatkan capaian kebijakan¹⁹. Capaian kebijakan diwujudkan dengan tercapainya indikator-indikator dalam implementasi kebijakan. Diharapkan adanya evaluasi yang terus-menerus dan dilakukan pembinaan akan tercapai perilaku yang lebih baik. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya fokus kepada evaluasi capaian termasuk tetapi termasuk didalamnya adalah evaluasi terhadap para pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini pendidikan islam perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik. Diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif dengan para pihak untuk dapat menjalankan kebijakan. Koordinasi menjadi sebuah cara untuk dapat menjadi program sebagai tujuan bersama dan capaian bersama. Sekaligus dapat menghilangkan ego sektoral pada masing-masing unit kerja.

Uraian diatas memberikan kesimpulan bahwa pendidikan islam membutuhkan dukunga melalui perilaku para implemtator kebijakan, sistem koordinasi yang baik dan evaluasi yang kontinu guna meningkatkan capaian kebijakan. Masih adanya perbedaan sikap terhadap kebijakan pendidikan islam menceminkan masih urgennya dilakukan pembinaan yang kontiu untuk meningkatkan kompetensi perilaku pelaksana kebijakan.

Pendidikan Islam Membutuhkan Dukungan Dana

Pendidikan islam formal dan non formal telah mendapatkan perhatian dana dari pemerintah²⁰. Pemberian beasiswa, penelitian untuk dosen serta sertifikasi untuk guru dan dosen telah diberikan oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah dalam dukungan dana terhadap pendidikan keislaman adalah masih adanya kesenjangan pemahaman bahwa urusan agama hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Pada implementasinya, pemerintah daerah sangat terbatas untuk memberikan dukungan dana terhadap pendidikan islam. Terhadap pendidikan non formal seperti pesantren sebaiknya tetap mendapatkan perhatian untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Semakin besar perhatian terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan islam semakin baik untuk membentuk karakter di masyarakat. Untuk kalangan pelajar yang mendapatkan pendidikan karakter sekolah sebaiknya tetap mendapatkan perhatian dana.

Hal praktis yang dapat digagas adalah dana BOS untuk bidang keagamaan. Jika dipandang pendidikan karakter ini menjadi sangat penting menghadapi era 4.0 maka memberikan alokasi BOS untuk keagamaan akan menjadi hal yang sangat positif. Penggunaan dana BOS saat ini diperuntukkan sebagian besar untuk insentif dan sebagiannya untuk sarana fisik, kebutuhan administrasi dan kegiatan. BOS untuk

¹⁸ H Rusdin Nawi and M Si, *Perilaku Kebijakan Organisasi*, vol. 1 (SAH MEDIA, 2017).

¹⁹ Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 54–65.

²⁰ Ida Kintamani DH, "Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2012): 65–84.

kegiatan keagamaan jika diadakan akan lebih banyak digunakan untuk anggaran kegiatan keagamaan di sekolah. Melalui kegiatan tersebut kegiatan keagamaan diharapkan menjadi berkembang dan mendapatkan respon yang baik dari pelajar maupun orangtua. Gagasan BOS untuk bidang keagamaan juga dapat menjadi cara praktis untuk meningkatkan karakter pelajar melalui pendidikan.

BOS khusus bidang keagamaan juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini lebih proporsional karena masing-masing daerah dapat memberikan alokasi sesuai kesipaan dukungan anggaran yang dimilikinya. Namun yang menjadi standarnya adalah pendidikan karakter di setiap daerah menjadi hal yang urgen dilakukan dan mendapatkan prioritas yang tinggi. Untuk menggagas hal ini tampaknya akan lebih efektif lagi jika ada kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat setidaknya memberikan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah memberikan bantuan dana untuk implementasi kebijakan dana untuk mendukung pendidikan keislaman. Pada konteks ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hal yang sangat positif untuk peningkatan pendidikan islam.

Dukungan pemerintah pusat kepada daerah untuk memberikan kebijakan dan bantuan dana pada pendidikan islam akan mengurangi kesenjangan antar dinas pendidikan dan kebudayaan dan juga kementerian agama di daerah. Koordinasi yang intensif sesuai dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan islam²¹. Jika keadaan sudah sinergis dari para penyelenggara kebijakan maka diharapkan capaian indikator keberhasilan kebijakan dapat ditingkatkan dan dikotomi pendidikan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan kementerian agama. Dapat disimpulkan bahwa jika ada kebijakan dari pemerintah pusat tentang BOS bantuan pendidikan keagamaan akan menjadi hal positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter.

Dana pembangunan untuk pendidikan karakter sama pentingnya dengan dana untuk pembangunan fisik. Ki Hajar Dewantara pernah mengingatkan bawah pendidikan yang terpenting itu adalah pendidikan budi pekerti dan pendidikan perilaku²². Hal ini memberikan gambaran pendidikan karakter sudah seharusnya sebagai unggulan dalam setiap periode pembangunan baik pusat maupun daerah. Pembangunan karakter sama artinya dengan pembangunan SDM untuk masa depan. Pada pembangunan sarana fisik dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan kesejahteraan, sedangkan karakter dibangun menjadikan keabadian karakter bangsa di masa yang akan datang. Pembangunan karakter menjadi kebutuhan masa depan untuk menjadikan dan menyiapkan generasi yang lebih baik. Memahami urgensi bangsa, pendidikan karakter dimasa mendatang adalah hal yang sangat urgen dan menjadi tantangan besar. Diperlukan penumbuhan kesadaran bersama dalam melaksanakan keadaan tersebut.

²¹ Ibnu Rusydi et al., "School Culture Program: Inculcating Anti- Corruption Values Through Honesty Canteen In State Elementary School: Case Study In Indramayu District, West Java, Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): 5362–78, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201633>.

²² Putu Aditya Antara, "Implementasi Pengembangan Karakter Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Holistik," *Jurnal Ilmiah Visi* 14, no. 1 (2019): 17–26.

Pada aspek pembangunan sebagian besar menjadikan pembangunan fisik adalah pembangunan yang menjadi prioritas besar dalam setiap anggaran daerah. Hal ini memang dapat dipahami bahwa pembangunan fisik menjadi pembangunan yang mudah dilihat kasat mata dan mendapatkan perhatian publik. Aspek ini sangat terkait dengan konteks politik. Aspek politik sangat membutuhkan program yang dapat secara mudah dilihat kasat mata dan menjadikan publik sebagai sasaran simpatik politik, maka pembangunan fisik secara khusus diimbangi seiring dengan populaliritas untuk para kepala daerah atau calon kepala daerah. Sedangkan aspek pembangunan karakter diasumsikan hasilnya tidak akan tampak kasat mata sehingga dalam aspek politik tidak terlalu banyak diprioritaskan oleh para calon pemimpin kepala daerah. Kritikan yang cukup tajam terkait dengan hal ini adalah menjadi pendidikan karakter itu hanya sebatas pelengkap dalam penyampaian visi dan misi serta program kerja, namun dalam implementasi kebijakan, pembangunan karakter itu sangat bergantung kepada keadaan perilaku dari kepala daerah serta kondisi politik yang ada di daerah tersebut. Jika dipandang pemasalah karakter pada era 4.0 ini menjadi hal yang urgen untuk dilakukan, maka sebaiknya ada keseragaman isu nasional terhadap pendidikan keagamaan.

Maka upaya pendidikan islam untuk mencapai tujuannya yaitu menanamkan karakter kepada generasi bangsa membutuhkan dukungan kebijakan anggaran. Dukungan kebijakan anggaran dapat dilakukan jika ada kesadaran bersama dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi pendidikan karakter sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi bangsa di masa mendatang. Maka untuk pencapaian dan optimalisasi pendidikan islam pada masa 4.0 dibutuhkan dukungan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.

Pendidikan Islam Membutuhkan Dukungan Masyarakat

Pendidikan islam sebaiknya tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap berpartisipasi. Masyarakat sebaiknya mendapatkan sosialisasi dari pemerintah untuk dapat terus bekerjasama dengan pemerintah dalam membina masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa kerjasama memberikan sarana untuk pendidikan keagamaan untuk pelajar atau penggunaan sarana umum ibadah untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan lainnya yang dapat difasilitasi oleh masyarakat. Sebaliknya pemerintah juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk perizinan, memberikan kemudahan untuk lembaga-lembaga masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan atau lembaga yang mau bekerjasama dengan pemerintah atau sekolah dalam kegiatan pembinaan karakter kepada pelajar.

Selain sosialisasi kepada masyarakat diperlukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang dapat menggunakan dana CSR (*capital social responsibility*) nya untuk kegiatan pembinaan karakter. Sosialisasi kepada perusahaan juga diharapkan mampu mengembangkan kesadaran bagi pemilik, pihak manajemen serta karyawannya untuk bersama-sama membangun kepedulian tentang pendidikan karakter. Namun sebaiknya, melalui kebijakan pemerintah ada timbal balik yang diberikan kepada perusahaan agar mempunyai kesamaan pandangan dalam pembinaan karakter.

Sosialisasi Pendidikan Islam Kepada Para Implementator

Pendidikan islam membutuhkan sosialisasi yang sempurna dan masif. Masih banyaknya kebijakan pendidikan islam yang dipahami tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sosialisasi kebijakan bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat bagaimana pendidikan islam yang sesuai dengan pedoman berbangsa dan bernegara. Membiarkan kebijakan hanya muncul melalui media tanpa adanya sosialisasi akan memberikan bias pendapat dan pemahaman di masyarakat. Salah satu contoh adalah tentang isu penghapusan mata pelajaran agama. Isu ini menyebar luas di masyarakat melalui media. Akibatnya kontroversi isu kebijakan ini menjadi masyarakat tampak antipati. Keadaan tersebut yang seharusnya dihindari oleh pemerintah agar pendidikan islam ini dapat dukungan yang penuh dari masyarakat. Untuk mensosialisasikan kebijakan yang masif kepada masyarakat banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal yang termudah adalah memberikan edaran tentang kebijakan kepada struktur pemerintahan. Pada konteks pendidikan kebijakan tersebut sebaiknya segera sampaikan kepada sekolah-sekolah. Sehingga sekolah-sekolah tidak mendapat tekanan opini yang berkembang di masyarakat tentang isu pengurangan mata pelajaran agama. Teknologi sangat memungkinkan melakukan sosialisasi melalui surat edaran elektronik. Adanya sosialisasi yang cepat akan memberikan kecepatan penjelasan. Inti dari kebijakan adalah mendapatkan dukungan publik sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Isu yang paling populer dalam konteks pendidikan islam juga adalah pencegahan anti radikalisme dan anti NKRI²³. Dua isu ini sangat sering terjadi dan muncul ke wilayah publik. Melalui media masa dan media elektronik isu ini menjadi isu yang paling sering ditayangkan melalui media. Kemudian memunculkan tanggapan beragam dan memunculkan kontroversi. Melihat kondisi ini tampaknya diperlukan analisis kebijakan yang lebih mendetil. Catatan kritisnya adalah isu yang menurut para ahli hanya menimpa kepada sebagian dengan pemahaman yang radikal kemudian di generalisir kepada banyak masyarakat yang dianggap punya paham yang sama. Apalagi jika generalisasi dilakukan juga kepada para pelajar. Isu bahwa para pelajar mempunyai pemahaman radikalisme dan anti NKRI akhirnya menjadi isu besar namun sebenarnya hal tersebut dapat dinetralisir dengan pengambilan analisis kebijakan yang lebih nyata dan riil.

Dampaknya dari isu radikalisme dan anti NKRI kemudian menjadikan adanya kebijakan pelarangan kegiatan keagamaan di sekolah²⁴. Hal ini yang sangat menimbulkan kontroversi. Kemudian publik menilai bahwa kegiatan keagamaan islam khususnya, dianggap sebagai kegiatan untuk menentang NKRI dan mendukung radikalisme. Kondisi ini sebaiknya tidak menjadi polemik di masyarakat. Munculnya kebijakan yang menjadikan polemik di masyarakat menandakan bahwa kebijakan

²³ Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 79–114.

²⁴ Moh Hasim, "Potensi Radikalisme Di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2015).

tersbeut tidak mempunyai akar yang kuat dari masyarakat²⁵. Dalam konstek ini akhirnya pendidikan islam menerima dampak bahwa islam adalah agama yang mengajarkan radikalisme dan anti NKRI. Jika keadaan ini sudah berkembang yang terjadi adalah konflik ideologi di masyarakat. Sebaiknya kondisi ini tidak terlalu menjadi konflik yang berkepanjangan. Dimanapun jika sudah terjadi konflik ideologi maka akan muncul keadaan sosial yang rawan konflik.

Penyelesaian terhadap isu-isu negatif terhadap pendidikan agama sebaiknya mendapatkan perhatian yang khusus. Sekolah adalah lembaga sangat mudah untuk dievaluasi secara berkala. Adanya evaluasi terhadap isu-isu pendidikan islam menjadi sangat penting untuk mengantisipasi isu-isu negatif tersebut. Dalam banyak kesempatan dan pendapat sangat banyak yang tidak setuju dengan isu radikalisme dan anti NKRI di sekolah. Dalam hal ini maka pendidikan islam tetap diperlukan sebagai upaya dini antisipasi bukan dengan kebijakan yang kontroversi yaitu pelarangan kegiatan keagamaan di sekolah atau mewaspadaai kegiatan-kegiatan kesialaman di sekolah.

Pemerintah dapat menyelesaikan dan memberikan evaluasi kepada sekolah dan orangtua tentang keislaman yang sesuai dengan pedoman berbangsa dan bernegara. Memberikan kurikulum pembelajaran keagamaan dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler dengan panduan atau arahan kebijakan. Jika hal tersebut dilakukan maka pendidikan islam tidak akan menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak luasnya yang diharapkan adalah sinerginya pendidikan islam di sekolah dengan model dan cara berbangsa dan bernegara.

Peran sosialisasi kepada masyarakat luas akan mengurangi tingkat kesalahan komunikasi antara pelaksana kebijakan. Selain kepada masyarakat diperlukan juga sosialisasi kepada para implementator kebijakan atau di struktur birokrasi. Edward II menyarankan agar para implementator mendapatkan penjelasan dari kebijakan-kebijakan²⁶. Kesepahaman para implementator harus dapat dipastikan bahwa pemahaman pembuat kebijakan harus sama dengan pemahaman para implementatornya. Adanya sosialisasi yang baik dan terstruktur tentang pendidikan islam diharapkan mampu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah.

Menyerap Nilai-Nilai Pesantren

Kurikulum pesantren mempunyai keunikan dalam melakukan pembinaan kepada para santrinya. Khususnya alam kurikulum atau dalam sistem pendidikan pesantren yang di prioritaskan adalah keterlaksanaan para guru atau kiainya²⁷ saat berada dalam lingkungan pembelajar. Keadaan ini memberikan inspirasi bahwa keteladanan guru akan menjadi tonggak utama dalam pembentukan karakter pelajar di

²⁵ Achmad Fawaid, Zamroni Zamroni, and Hasan Baharun, "Contesting Sacred Architecture: Politics of 'Nation-State' in the Battles of Mosques in Java," *QIIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 1 (2019): 129–72.

²⁶ Faria Ruhana and Yesi Yuliana, "Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan," *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 10, no. 02 (2013).

²⁷ M Syaifuddin Zuhriy, "Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2011): 287–310.

sekolah. Guru agama yang menjadi garda depan dalam pembentukan karakter. Namun tidak hanya guru agama pendidikan karakter juga membutuhkan lingkungan yang baik untuk sinergi membangun sistem pendidikan karakter. Jadi seluruh guru dalam lingkungan dan sekolah itu diwajibkan juga untuk bersama-sama menanamkan karakternya kepada pelajar. Pembinaan karakter dalam kurikulum K13 telah menjadi muatan untuk dilaksanakan oleh guru. Adanya penanaman karakter melalui seluruh mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Nilai-nilai pesantren yang banyak mempunyai keunikan sebaiknya menjadi bahan untuk diserap pada pembelajaran di sekolah.

Upaya menyerap nilai-nilai pendidikan karakter pesantren juga dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama pendidikan di sekolah dan pesantren. Model yang dapat dibangun antara sekolah misalnya dengan menghadirkan kiai atau ulama ke sekolah secara berkala. Keadaan ini memang belum lazim dilakukan. Namun sebagai sebuah gagasan ini sebaiknya menjadi renungan untuk dapat dilakukan atau diimplementasikan. Ada hal menarik unik dari sebuah teori bahwa keunikan dari guru itu bukan dari metodenya atau isi kurikulumnya tetapi dari kekuatan kepribadian gurunya. Kekuatan kepribadian gurunya yang dimaksud adalah kekuatan spiritualnya. Pesantren tradisional dengan bimbingan kiai dalam kesederhanaan mereka secara fisik masih bisa bertahan untuk melakukan pembelajaran yang secara umum mereka mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan baik. Untuk itu kekuatan spiritual di sekolah dengan menghadirkan ulama ke sekolah diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual siswa dan guru di sekolah. Dampak yang diharapkan selanjutnya adalah meningkatkan motivasi dari guru dan siswa untuk meningkatkan kompetensi akademik karena spiritual akan memberikan efek kesadaran terhadap diri para pelajar. Perbaiki spiritual guru maka spiritual siswa akan menjadi baik.

Cara lain untuk mendekatkan nilai-nilai pesantren adalah dengan melakukan kegiatan kepesantrenan di sekolah atau membuat suasana sekolah di pesantren. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan di sekolah dengan menyesuaikan keadaan sekolahnya. Kegiatan kepesantrenan saat ini hanya dilakukan pada bulan suci Ramadhan. Namun sebaiknya kegiatan kepesantrenan tidak hanya dilakukan pada bulan suci Ramadhan. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ini setiap bulan misalnya dengan membangun nuansa pesantren di sekolah. Hal yang perlu ditanamkan kepada para siswa adalah pemahaman tentang tauhid, ibadah dan muamalah khususnya penanaman nilai kebangsaan. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di sekitar sekolah. Hal dalam ini akan lebih baik jika ada kebijakan pemerintah untuk menjembatani kelembagaan formal dan non formal. Keterlibatan pemerintah dalam kerjasama ini menjadi dasar untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung kegiatan tersebut.

Pemerintah dapat memberikan stimulus dan memfasilitasi kegiatan tersebut agar menjadi kegiatan yang legal dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian tanggungjawab pemerintah terhadap pendidikan karakter yang ada di daerah. Hal ini akan menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah memberikan ruang yang baik untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang telah

melibatkan banyak elemen di masyarakat. Untuk keterlibatan lainnya pemerintah dapat melibatkan para pihak seperti BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau perusahaan lainnya yang punya kepedulian terhadap penanaman karakter pelajar.

Pada konterks pendidikan di daerah pemerintah dapat memulai kegiatan pesantren di sekolah dengan memberikan fasilitas kerjasama antara kementerian agama di kabupaten dengan dinas pendidikan dan kebudayaan²⁸. Dua institusi ini merupakan penyangga utama untuk menanamkan karakter kepada pelajar. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan bantuan kepada sekolah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dukungan dana kebijakan ini akan mendorong penerimaan kegiatan tersebut di sekolah dan masyarakat.

Selain kebijakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah daerah pun mempunyai kesempatan memberikan pesan-pesan keagamaan melalui budaya lokalnya. Keadaan ini menjadi sinergi antara kebutuhan untuk mempertahankan karakter kedaerahan dan karakter keagamaan. Jika ini dilakukan secara kontinu kepada sekolah dimulai dengan melakukan program percontohan kepada beberapa sekolah, kemudian pada tahun kedepannya dilakukan kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Perbaikan kemudian dilakukan dengan memberikan evaluasi secara rutin untuk melihat perkembangan capaian kegiatan pesantren sekolah. Sehingga pelibatan elemen untuk bersama-sama meningkatkan karakter pelajar pada revolusi industri 4.0 dapat dilakukan secara sinergi di banyak daerah dan berdampak luas pada kesiapan para siswa menghadapi masa depan.

Upaya pemerintah dengan mendekatkan pesantren ke sekolah pun sekaligus menjawab kesenjangan pendidikan agama dan pendidikan umum serta mengurangi kesenjangan pemahaman ego sektoral agama antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya tersebut merupakan langkah positif untuk mengembangkan sebuah model penanaman karakter kepada pelajar serta melakukan tindakan pencegahan terhadap karakter negatif dari dampak pembembangan era 4.0. Dampak yang lebih diharapkan di masa depannya adalah Indonesia mempunyai sebuah sistem penanaman karakter yang tepat sesuai dengan agama, kebangsaan dan budaya. Sehingga masa depan bangsa Indonesia akan dipenuhi dengan SDM yang mempunyai kesiapan mental dan kompetensi untuk melanjutkan kejayaan bangsa.

Simpulan

Pendidikan islam masih mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjaga dan meningkatkan karakter pelajar agar tetap sesuai dengan agama, nilai budaya dan kebangsaan Indonesia. Untuk meningkatkan peran pendidikan islam diperlukan evaluasi secara kontinu guna memberikan masukan-masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter. Untuk menunjang keberhasilan peran pendidikan islam, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah, pemerintah daerah dan dukungan politik di daerah. Selain aspek dukungan kebijakan, juga diperlukan dukungan SDM dan dana. Partisipasi dari masyarakat dan perusahaan swasta sangat berperan dalam peningkatan karakter pelajar. Diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan perusahaan

²⁸ Ahmad Fauzi et al., "E-Learning in Pesantren: Learning Transformation Based on the Value of Pesantren," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1114 (IOP Publishing, 2018), 12062.

melalui sosialisasi kebijakan. Untuk lebih meningkatkan peran pendidikan islam sangat diperlukan serapan nilai-nilai pesantren untuk dimplementasikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 1–11.
- Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 54–65.
- Antara, Putu Aditya. "Implementasi Pengembangan Karakter Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Holistik." *Jurnal Ilmiah Visi* 14, no. 1 (2019): 17–26.
- DH, Ida Kintamani. "Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2012): 65–84.
- Fauzi, Ahmad, Hasan Baharun, Akmal Mundiri, and Umar Manshur. "E-Learning in Pesantren: Learning Transformation Based on the Value of Pesantren." In *Journal of Physics: Conference Series*, 1114:12062. IOP Publishing, 2018.
- Fawaid, Achmad, Zamroni Zamroni, and Hasan Baharun. "Contesting Sacred Architecture: Politics of 'Nation-State' in the Battles of Mosques in Java." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 1 (2019): 129–72.
- Febrino, Febrino. "Tindakan Preventif Pengaruh Negatif Gadget Terhadap Anak." *NOURA: JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK* 1, no. 1 (2017): 1–21.
- Hasim, Moh. "Potensi Radikalisme Di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2015).
- Hyoscyamina, Darosy Endah, and Kartika Sari Dewi. "Pengembangan Program Parenting Bagi Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Psikologi Positif Dan Karakter Islami," 2012.
- Ibnu Rusydi, Ali Miftakhu Rosyad, Ibnudin, Kambali, and Ujang Suratno. "School Culture Program: Inculcating Anti- Corruption Values Through Honesty Canteen In State Elementary School: Case Study In Indramayu District, West Java, Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): 5362–78. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201633>.
- JUHJĪ, Juhji, and Prasart NUANGCHALERM. "Interaction between Science Process Skills and Scientific Attitudes of Students towards Technological Pedagogical Content Knowledge." *Journal for the Education of Gifted Young Scientists* 8, no. 1 (n.d.): 1–16.
- JULAWATI, LALA. "PELAKSANAAN PROGRAM AJENGAN MASUK SEKOLAH OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2019): 89–102.
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Studi Pemerintahan* 2, no. 2 (2011).

- Lestari, Asih Widi, and Firman Firdausi. "Peran Pemerintah Kota Batu Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 30, no. 3 (2017): 260–65.
- Nawi, H Rusdin, and M Si. *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2017.
- Nugroho, Arief Aji. "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PROGRAM BELA NEGARA DI MEDIA ONLINE METROTVNEWS. COM DAN SINDONEWS. COM PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER 2015," 2017.
- Nursyamsiyah, Siti. "Penguatan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Mu'adalah Di Era Globalisasi (Studi Kasus Pondok Pesantren Modern Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember)." *TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 2, no. 1 (2019): 21–34.
- Programme, The, International Student Assessment, and I Tables. "Greece What 15-Year-Old Students in Greece Know and Can Do Figure 1 . Snapshot of Performance in Reading , Mathematics and Science," 2018, 1–10. http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SAU.pdf.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1–12.
- Rokhmad, Abu. "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 79–114.
- Rosyad, Ali Miftakhu. "Al-Afkar, Journal for Islamic Studies URGENSI INOVASI PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Al-Afkar, Journal for Islamic Studies THE URGENCY OF LEARNING INNOVATION ON ISLAMIC RELIGIOUS STUDY" 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.5281/zenodo.2546882>.
- . "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Muhammadiyah Se-Kabupaten Indramayu. Al-Afkar." *Journal for Islamic Studies* 4 (n.d.).
- Rouf, Abd. "Potret Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 1 (2015): 187–206.
- Ruhana, Faria, and Yesi Yuliana. "Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 10, no. 02 (2013).
- Sari, Dian Cita, Deddy Wahyudin Purba, and Muhammad Said Hasibuan. "Inovasi Pendidikan Lewat Transpormasi Digital." Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Siagian, Haidir Fitra. *Komunikasi Politik Ulama*. Alauddin University Press, 2012.
- Zuhriy, M Syaifuddin. "Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2011): 287–310.